

EVALUASI KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA GEMPA BUMI DI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

Fildzah Apriliani Mayendri

NPP. 29.0207

Asdaf Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan
Publik

Email: fildzahapriliani00@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): This research is entitled "Evaluation of Earthquake Disaster Mitigation Policy in Padang City, West Sumatra Province". **Purpose:** The researcher conducted this research against the background of earthquakes that often occur every year and have a high impact on losses, therefore this study was conducted aiming to find out how the implementation of earthquake mitigation policies in Padang City, West Sumatra Province and to find out the obstacles and efforts made by the Padang City Regional Disaster Management Agency.

Method: the research method used is a descriptive qualitative research method with an inductive approach, which is a method by systematically describing the reality or actual situation in the field and then analyzing it in order to provide solutions to the problems found. Data collection techniques by conducting interviews, documentation, and observation. The steps of data analysis are data reduction, data presentation and finally drawing conclusions. **Results/Findings:** The results of this study indicate that the implementation of earthquake disaster mitigation policies in the city of Padang is classified as ineffective, due to obstacles that can be seen from the inadequate infrastructure owned by BPBD, staff capacity is still lacking and public awareness is still low on risks. disaster impact. **Conclusion:** there are obstacles in the implementation of earthquake disaster mitigation policies in the city of Padang so that the efforts made in dealing with these obstacles are cooperation between government agencies or vertical agencies, increasing employee capacity by routinely carrying out training and conducting socialization and inviting all regional heads to participate actively. The area is prone to earthquakes.

Keywords: Evaluation, Policy, Earthquake Mitigation.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini berjudul "Evaluasi Kebijakan Mitigasi Bencana Gempa Bumi di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat". **Tujuan:** peneliti melakukan penelitian ini dilatarbelakangi oleh bencana gempa bumi yang kerap terjadi setiap tahunnya dan berdampak kerugian yang tinggi oleh sebab itu penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan mitigasi gempa bumi di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat serta mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. **Metode:** metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif yaitu suatu metode dengan cara

mendeskrripsikan secara sistematis tentang kenyataan atau keadaan yang sebenarnya di lapangan untuk kemudian dianalisis guna memberi pemecahan masalah yang ditemukan. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Adapun Langkah-langkah analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan yang terakhir penarikan kesimpulan.

Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana gempa bumi di Kota Padang digolongkan belum efektif, karena adanya hambatan yang dapat dilihat dari belum memadainya sarana prasarana yang dimiliki BPBD, kapasitas pegawai yang masih kurang dan kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap resiko dampak bencana.

Kesimpulan: adanya hambatan dalam pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana gempa bumi di Kota Padang sehingga upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan ini adalah kerjasama antar lembaga pemerintah ataupun instansi vertikal, meningkatkan kapasitas pegawai dengan rutin melaksanakan pelatihan dan melakukan sosialisasi dan mengajak berperan aktif kepada seluruh kepala wilayah yang daerahnya rawan terkena bencana gempa bumi.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Mitigasi Gempa Bumi

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ditinjau dari letak secara geografis, negara Indonesia rentan terhadap ancaman bencana (Wibowo & Taufik, 2017). Upaya penanggulangan risiko bencana sangatlah dibutuhkan dan disertai dengan pengetahuan mengenai penanggulangan bencana. Kota Padang dikenal sebagai *Risk City* yaitu kota yang memiliki risiko bencana yang sangat tinggi (Sudibyakto, 2011). Dalam data Risiko Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Padang tingkat bencana pada setiap kelurahan berbeda misalnya di Kawasan pesisir pantai yang memiliki tingkat kerawanan bencana paling tinggi di Kota Padang karena kawasan tersebut pemukiman penduduknya sangat padat.

Mengantisipasi risiko tinggi kebencanaan, Pemerintah Kota Padang telah mengimplementasikan beragam kebijakan dalam manajemen bencana. Namun dalam pelaksanaannya, perlu ditinjau dan dievaluasi secara komprehensif sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam melakukan mitigasi bencana maupun rehabilitasi pasca bencana. Evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson, 1975). Dalam konteks manajemen kebencanaan, sejak 2007 berbagai kebijakan Pemerintah Kota Padang sudah digulirkan. Oleh sebab itu, studi tentang evaluasi kebijakan ini perlu dilakukan.

Evaluasi memiliki tujuan untuk melihat sasaran kebijakan dan tujuannya apakah sudah baik dan sudah tepat. Evaluasi juga untuk melihat tingkat efisiensi kebijakan tersebut manfaat apa yang dimilikinya serta berapa biaya yang dibutuhkan apakah efisien atau tidak. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat apakah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan untuk melihat hal apa saja yang menjadi evaluasi guna memperbaiki pelaksanaan kebijakan kedepannya agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik tanpa hambatan, terutama hambatan yang tidak akan terulang setelah melakukan evaluasi.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pada pelaksanaan mitigasi bencana perlu dilakukannya evaluasi agar kinerja kedepannya menjadi lebih baik lagi. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya edukasi tentang bencana gempa bumi, dan keterbatasan sarana dan prasarana yang mengakibatkan kurang efektif dan cepatnya penanganan bencana gempa bumi. Kedua hal tersebut merupakan hal penting yang harus ditingkatkan dalam hal mitigasi bencana ini dikarenakan dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup maka akan memudahkan kita dalam pelaksanaan mitigasi bencana sehingga dapat mengurangi sedikit kerugian pasca kejadian bencana. Masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli dan berpartisipasi terhadap mitigasi bencana gempa bumi, padahal partisipasi dan dukungan

dari masyarakat sangatlah penting karena dalam hal kebencanaan bukan hanya urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan tetapi bencana adalah urusan bersama. Pihak-pihak terkait lainnya juga memberikan bantuan berupa personel dan sarana dan prasarana yang memang saat ini BPBD Kota Padang masih kekurangan sarana prasarana. Hal ini yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah dan pemerintah harus lebih memperhatikan perihal kebencanaan yang merupakan hal paling penting untuk dilakukan. Dari beberapa hambatan tersebut yang paling perlu ditingkatkan ialah dalam hal edukasi. Edukasi tersebut merupakan hal yang paling perlu untuk ditingkatkan karena apabila edukasi yang dimiliki masih kurang hal itu yang menyebabkan masyarakat masih tidak peduli terhadap adanya mitigasi bencana. Padahal mitigasi bencana ini merupakan hal yang sangat perlu untuk dilakukan. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan Teori CIPP oleh Stufflebeam untuk melihat bagaimana evaluasi dalam pelaksanaan mitigasi bencana gempa bumi tersebut agar kedepannya bisa terlaksana dengan baik.

1.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Peneliti/ Tahun	Judul dan Metode	Tujuan	Hasil Penelitian
1	Rahmadian Novert/ 2015	Evaluasi Kebijakan Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat Kota Padang Dalam Menghadapi Deskriptif Bencana Gempabumi dan Tsunami dan menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan Metode	Melihat evaluasi yang harus dilakukan dari kebijakan pemerintah yang sudah dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"> •Telah dilaksanakannya berbagai program kesiapsiagaan oleh Pemerintah Kota Padang. Evaluasi dilihat dari mayoritas program yang dibuat masih bersifat <i>opportunistic</i> dan belum terlaksana secara berkelanjutan. •Penyediaan fasilitas pendukung kesiapsiagaan masyarakat rata-rata masih dalam tahap perencanaan seperti perbaikan jalur evakuasi, dan penyediaan lokasi evakuasi vertikal. •Berbagai kebijakan ada yang sudah terlaksana dan terencana dengan baik berdasarkan dengan 4 kajian teori (<i>skill level, planning, protection, prevention</i>).
2	Muhammad Ahsan Samad, Erdiyansyah, Rina Wulandari/ 2020	Evaluasi Kebijakan Pemerintah Pasca Bencana dengan studi kasus bencana di Sulawesi Tengah dan menggunakan Pendekatan Kualitatif	Membahas tentang masyarakat Kota Palu yang terkena dampak dari bencana dan kebijakan yang pemerintah kota lakukan dalam menyikapi kondisi perekonomian pasca bencana.	<ul style="list-style-type: none"> •Pemerintah belum memperhatikan upaya mitigasi bencana di daerah Sulawesi Tengah dengan baik sehingga masih banyak dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya bencana. •Kebijakan pemerintah yang ada belum terlaksana dengan cukup baik dan menjadi kesulitan ketika kota mengalami pasca bencana.
3	Michael Rachmatullah, Octavianus H.A. Rogi dan Sonny Tilaar/ 2016	Evaluasi Kebijakan Pola Ruang dan Struktur Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Banjir	Tingkat rawan bencana, tingkat kerentanan bencana, tingkat risiko bencana banjir dan	<ul style="list-style-type: none"> •Kebijakan rencana pola ruang di Kota Palu sudah cukup tanggap terhadap tingkat risiko yang ada.

		studi kasus Kota Palu dan menggunakan Pendekatan Deskriptif	kondisi jalan serta kawasan-kawasan di Kota Palu.	<ul style="list-style-type: none"> Secara keseluruhan pola tata ruang yang disusun sudah cukup baik dan sudah terencana dengan baik.
4	Mochamad Rizki Fitrianto/ 2020	Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Bencana dengan studi kasus pada BPBD Kabupaten Kediri dan menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan metode deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> Mengkaji dari segi indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan serta hambatan dan tantangan dalam evaluasi kebijakan. Melihat kegiatan dari penanggulangan bencana di Kabupaten Kediri dari segi internal ataupun eksternal. 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Kediri sudah diimplementasikan dan sudah berlaku secara efektif pasca terjadinya bencana letusan erupsi Gunung Kelud yang terjadi pada tahun 2014. Masih adanya beberapa pokok-pokok yang tertuang dalam kebijakan penanggulangan bencana yang belum tercapai. Indikator efisiensi belum terpenuhi didasarkan pada adanya kemungkinan pemborosan baik dalam hal materiil maupun non materiil.

Sumber : Diolah Penulis, 2021

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada teori yang digunakan, penelitian ini menggunakan teori CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikemukakan oleh Stufflebeam. Pada penelitian ini, peneliti mengkaji bagaimana pelaksanaan dalam kegiatan mitigasi bencana di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif melalui metode deskriptif dengan pendekatan induktif untuk menggunakan teori Stufflebeam.

1.5 Tujuan

- Untuk mengetahui evaluasi kebijakan mitigasi bencana gempa bumi di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.
- Untuk mengetahui faktor penghambat dalam mitigasi bencana di Kota Padang.
- Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam mitigasi bencana di Kota Padang Sumatera Barat.

II. METODE

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui metode deskriptif dengan pendekatan induktif dalam meneliti evaluasi dari pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana gempa bumi di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Pendekatan induktif itu sendiri bertujuan secara khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum sehingga dihasilkan kesimpulan yang dapat menggambarkan fenomena permasalahan yang dikaji. Metode penelitian deskriptif dapat menggambarkan tentang keadaan sebenarnya fenomena yang dipermasalahkan dari fakta-fakta terhadap suatu permasalahan tertentu dalam pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana gempa bumi di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Penulis menggunakan pendekatan induktif dalam melakukan penelitian ini. Pendekatan induktif itu sendiri dapat diartikan sebagai prosedur yang tersusun secara sistematis dalam menganalisis data kualitatif serta melakukan pengamatan terhadap suatu objek secara umum dan kemudian mengambil analisis dan kesimpulan. Menggunakan pendekatan induktif ini penulis dapat menyimpulkan secara umum tentang fakta atau permasalahan yang menjadi temuan di lapangan, sehingga penulis dapat mencari solusi dalam penyelesaian masalah tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti mengangkat permasalahan terkait Mitigasi Bencana Gempa Bumi di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan teori CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikemukakan oleh Stufflebeam juga untuk mengetahui faktor penghambat serta upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Kota Padang. Tahapan dalam melakukan evaluasi CIPP yaitu :

3.1 Evaluasi Kebijakan Mitigasi Bencana ditinjau dari Dimensi Konteks

Analisis terhadap data yang dihimpun melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi, dapat disimpulkan aspek tujuan dan sasaran penyusunan program sudah jelas, tertulis dan berkelanjutan. Namun, belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai mitigasi bencana gempa bumi di Kota Padang. Kemudian, pada aspek dasar kebijakan penyusunan program telah memiliki acuan dasar hukum yang jelas. Secara umum, komponen evaluasi konteks dalam pengelolaan bank sampah telah memenuhi kriteria evaluasi.

Fakta empirik dari evaluasi pada komponen konteks berdasarkan temuan melalui wawancara, studi dokumen, dan observasi relevan dengan teori Stufflebeam. Stufflebeam menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah kebijakan sudah dilakukan sesuai dengan pedoman atau tujuan dan sasaran serta acuan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, perlu diketahui tujuan dan sasaran serta acuan kebijakan mitigasi bencana banjir agar evaluasi bisa dilakukan.

Paparan analisis tersebut dapat dipahami bahwa hasil evaluasi komponen konteks telah relevan dengan perspektif teoritis dan perspektif legalistik yang penulis gunakan pada topik ini. Pada aspek tujuan dan sasaran penyusunan program serta dasar kebijakan penyusunan program telah relevan. Sehingga, bisa disimpulkan secara keseluruhan ketercapaian kebijakan mitigasi bencana pada komponen konteks telah memenuhi kriteria evaluasi.

3.2 Evaluasi Kebijakan Mitigasi Bencana ditinjau dari Dimensi Input

Dimensi *input* dalam penelitian evaluasi merujuk pada paparan data dan fakta yang didapatkan selama penelitian berupa bentuk mitigasi struktural yang dapat dilihat pada lampiran yang terlampir. Adapun pada dimensi *input* mencakup 4 aspek yakni : struktur organisasi dan pelaksana kebijakan, prosedur pelaksanaan kebijakan, pembiayaan pemerintah, dan dukungan pemerintah. Berikut ini merupakan jabaran terhadap temuan peneliti yang meliputi keempat aspek tersebut.

3.2.1 Struktur Organisasi dan Pelaksana Kebijakan

Studi dokumentasi menunjukkan bahwa kebijakan mitigasi bencana memiliki struktur organisasi dan pelaksana kebijakan yang jelas. Data wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan menyatakan struktur organisasi kebijakan mitigasi memiliki minimal 15 jabatan, yaitu : Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kasubag Umum, Kasubag Keuangan, Kasubag Program, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kabid Kedaruratan dan Logistik, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kasi Pencegahan, Kasi Kesiapsiagaan, PUSDALOPS PB, Kasi Kedaruratan, Kasi Logistik, Kasi Rehabilitasi, dan Kasi Rekonstruksi. Jabatan struktur organisasi kebijakan mitigasi bencana tersebut dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan keperluan berdasarkan dinamika di

lapangan. Berdasarkan rincian tugas dan fungsi serta prosedur kerja diatas, dapat diketahui struktur organisasi dan pelaksana kebijakan mitigasi bencana telah jelas.

3.2.2 Prosedur Pelaksanaan Kebijakan

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan di BPBD Kota Padang yaitu melalui wawancara yang mana mengatakan bahwa standar operasional prosedur di BPBD itu sendiri terbagi dalam 3 bidang yang mana tupoksi yang ada di letakkan pada masing-masing bidang tersebut agar memiliki Standar Operasional Prosedur atau disebut dengan SOP yang jelas sehingga memudahkan dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam penelitian ini diperoleh juga informasi terkait pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana memiliki prosedur operasi standar yang terdapat pada lampiran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Kemudian POS tersebut dimodifikasi dan diadaptasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah terdampak bencana. SOP tersebut sesuai dengan tujuan mitigasi bencana yakni kesiapan masyarakat dalam tanggap darurat bencana. Metode dalam pelaksanaan kebijakan dalam hal kebencanaan harus sesuai rasio serta bagaimana bertindak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

3.2.3 Pembiayaan Pemerintah

Pembiayaan pemerintah merupakan salah satu aspek pada dimensi input yang mana memiliki kriteria evaluasi sebagai berikut: ada alokasi pembiayaan kebijakan secara khusus dan berkelanjutan; ada ketentuan siapa yang berhak menerima bantuan; dan ada persyaratan mengapa masyarakat tersebut yang menerima bantuan. Selanjutnya juga membahas terkait dengan siapa saja yang berhak dalam menerima bantuan dana dari pemerintah. Biasanya yang menerima bantuan dana dari pemerintah itu memiliki kriteria yang mana diutamakan bagi keadaan rumah yang rusak parah yang mana nanti akan diperiksa oleh tim Jitupasna. Setelah dilakukan pemeriksaan baru selanjutnya dapat diputuskan apakah rumah tersebut berhak untuk menerima bantuan dari pemerintah.

3.2.4 Dukungan Pemerintah

Dukungan pemerintah merupakan salah satu hal yang wajib dalam setiap kebijakan yang akan dilakukan karena tanpa adanya dukungan dari pemerintah itu sendiri akan sulit dalam melaksanakan kebijakan. Dan juga membantu masyarakat dalam mengatasi dampak bencana yang terjadi melalui bantuan berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

3.3 Evaluasi Kebijakan Mitigasi Bencana ditinjau dari Dimensi *Process*

Dimensi *process* dalam penelitian evaluasi merujuk pada paparan data dan fakta yang didapatkan selama penelitian. Data tersebut mencakup 5 aspek yakni : kesesuaian antara tujuan dan pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana gempa bumi, pemahaman kebijakan pelaksana kebijakan, pelaksana kebijakan, penggunaan anggaran, dan pengawasan dan transparansi pelaksanaan kebijakan. Berikut ini merupakan jabaran terhadap temuan peneliti yang meliputi kelima aspek tersebut.

3.3.1 Kesesuaian Antara Tujuan dan Pelaksanaan Kebijakan Mitigasi Bencana Gempa Bumi

Kesesuaian antara tujuan dan pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana gempa bumi merupakan salah satu aspek pada dimensi *process* yang mana memiliki kriteria evaluasi adanya pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan. Antara tujuan dengan pelaksanaan kebijakan mitigasi tersebut haruslah memiliki kesesuaian agar dalam pelaksanaan kebijakan itu dapat mencapai tujuannya. Pemerintah sudah menjalankan kebijakan mitigasi bencana gempa untuk mengurangi

korban bencana dari gempa bumi. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang pembangunan rumah tahan gempa kepada masyarakat.

3.3.2 Pemahaman Kebijakan Pelaksana Kebijakan

Terselenggaranya kebijakan dengan baik merupakan salah satu hasil dari pemahaman kebijakan. Dengan kita memahami terkait kebijakan itu maka akan mudah dalam penyelenggaraannya juga sehingga dapat terselenggara dengan baik. Dalam menjalankan kebijakan mitigasi masih terkendala dengan kurangnya pemahaman pegawai terhadap kebijakan mitigasi tersebut yang terlihat dengan capaian yang diperoleh masih kurang dari 50% dari jumlah masyarakat dalam program keluarga cerdas bencana.

3.3.3 Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu aspek dari dimensi *process* yang mana memiliki kriteria evaluasi yaitu : kebijakan dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelaksanaan dan ada laporan regular pelaksanaan kebijakan yang akuntabel. Dalam pelaksanaan kebijakan yang baik bisa dikatakan baik apabila sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut juga harus adanya laporan regular yang akuntabel sehingga kita dapat melihat bagaimana proses dalam pelaksanaan kebijakan itu sendiri.

3.3.4 Penggunaan Anggaran

Anggaran merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan. Sehingga dalam hal ini kita harus mengetahui apakah anggaran itu sudah dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan ataupun belum. Dalam penggunaan anggaran pemerintah terkait pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana dalam meminimalisir dampak yang terjadi sudah berjalan cukup baik yang ditandai dengan adanya berbagai bentuk penerapan kebijakan yang dilakukan terhadap masyarakat. Juga terdapat data berupa Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang yang penulis lampirkan pada bagian lampiran.

3.3.5 Pengawasan dan Transparansi Pelaksanaan Kebijakan

Dalam hal pelaksanaan kebijakan tentunya harus ada pengawasan dan transparansi pelaksanaan kebijakan agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Dengan ada nya pengawasan tersebut tentunya harus ada yang dinamakan dengan evaluator/ pengawas dari kebijakan tersebut sehingga terciptalah sebuah lampiran kebijakan yang selanjutnya akan disampaikan kepada pemerintah secara berkala.

3.4 Evaluasi Kebijakan Mitigasi Bencana Gempa Bumi ditinjau dari Dimensi *Product*

Dimensi *product* dalam penelitian evaluasi merujuk pada paparan data dan fakta yang didapatkan selama penelitian. Data tersebut mencakup 2 aspek yaitu : hasil pelaksanaan kebijakan untuk masyarakat dan hasil pelaksanaan kebijakan bagi pemerintah yang mana *product* ini merupakan dimensi terakhir dalam teori evaluasi CIPP. Dalam dimensi *product* ini yang kita lihat itu adalah hasilnya. Bagaimana hasilnya untuk kedepan baik bagi pemerintah ataupun masyarakat. Berikut ini merupakan jabaran terhadap temuan peneliti yang meliputi kedua aspek tersebut.

3.4.1 Hasil Pelaksanaan Kebijakan untuk Masyarakat

Hasil pelaksanaan kebijakan untuk masyarakat merupakan salah satu aspek dari dimensi *product* yang mana memiliki kriteria evaluasi yaitu : masyarakat menjadi tanggap dalam hal mitigasi bencana gempa bumi dan mengurangi akibat dari bencana.

3.4.2 Hasil Pelaksanaan Kebijakan bagi Pemerintah

Hasil pelaksanaan kebijakan bagi pemerintah merupakan salah satu aspek dari dimensi product yang mana memiliki kriteria evaluasi yaitu : berkurangnya dampak setelah kejadian bencana dan memudahkan dalam pelaksanaan mitigasi pasca bencana gempa bumi karena sudah ada kebijakan yang mengatur.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, ditemukan beberapa faktor yang cukup mempengaruhi terhadap efektivitas kerja ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. Analisis wawancara, data, dan observasi yang didapat oleh peneliti menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi faktor penghambat dalam menanggulangi pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana gempa bumi yaitu kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya edukasi tentang bencana gempa bumi, dan keterbatasan sarana dan prasarana yang mengakibatkan kurang efektif dan cepatnya penanganan bencana gempa bumi. Kedua hal tersebut merupakan hal penting yang harus ditingkatkan dalam hal mitigasi bencana ini dikarenakan dengan adanya sarana dan prasarana yang cukup maka akan memudahkan kita dalam pelaksanaan mitigasi bencana sehingga dapat mengurangi sedikit kerugian pasca kejadian bencana.

Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yaitu masih kurangnya edukasi baik terhadap pemerintah maupun masyarakat dikarenakan sosialisasi yang kurang. Saat ini BPBD Kota Padang sudah melakukan peningkatan dalam hal edukasi. BPBD Kota Padang sudah sering melakukan sosialisasi terhadap masyarakat baik itu masyarakat umum maupun di sekolah-sekolah. Selain itu, dalam pelaksanaannya masih kurangnya fasilitas-fasilitas yang ada sehingga sedikit menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana yang sudah ada. Namun memang sudah ada beberapa fasilitas yang menunjang dalam pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana gempa bumi di Kota Padang contohnya yaitu adanya EWS atau disebut dengan *Early Warning System* yang biasanya akan selalu aktif apabila gempa yang dirasakan berkekuatan di atas 7 SR. Saat ini juga sudah ada yang dinamakan dengan *shelter* yang merupakan salah satu usaha dalam pelaksanaan mitigasi bencana tsunami yang apabila jika terjadi gempa dengan kekuatan yang sangat besar maka masyarakat diarahkan untuk melakukan pengungsian ke *shelter-shelter* yang sudah ada di Kota Padang tersebut.

Dari beberapa hambatan tersebut yang paling perlu ditingkatkan ialah dalam hal edukasi. Edukasi tersebut merupakan hal yang paling perlu untuk ditingkatkan karena apabila edukasi yang dimiliki masih kurang hal itu yang menyebabkan masyarakat masih tidak peduli terhadap adanya mitigasi bencana. Padahal mitigasi bencana ini merupakan hal yang sangat perlu untuk dilakukan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan bahwa secara teoretis evaluasi kebijakan mitigasi bencana gempa bumi di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi dimensi CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Namun demikian, terdapat hal penting yang harus diterapkan untuk pelaksanaan kebijakan ini demi kebaikan bersama. Hal ini, tentunya, perlu perhatian dan penetapan prioritas pemerintah Kota Padang agar hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan

mitigasi bencana ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Mengadakan Kebijakan mitigasi bencana yang ada di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sudah terlaksana dengan baik dikarenakan sudah dilaksanakan dan dilakukan sesuai dengan prosedur dan sudah cukup memenuhi dimensi evaluasi CIPP. Namun adanya beberapa hambatan dilihat dari dimensi :

- *Context* : Tujuan dan sasaran penyusunan program telah jelas, tertulis dan berkelanjutan. Namun, belum ada peraturan khusus tentang mitigasi bencana gempa bumi di Kota Padang, dasar kebijakan program sudah memiliki acuan dasar hukum yang jelas.
- *Input* : Struktur organisasi dan pelaksana program jelas, namun belum ada kualifikasi, Prosedur pelaksanaan program sesuai, namun belum ada parameter keberhasilan.
- *Process* : Prosedur pelaksanaan program sesuai, namun belum ada parameter keberhasilan.
- *Product* : Sudah memberikan hasil baik bagi masyarakat maupun pemerintah.

Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini secara umum ialah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya edukasi tentang bencana gempa bumi, dan keterbatasan sarana dan prasarana yang mengakibatkan kurang efektif dan cepatnya penanganan bencana gempa bumi sehingga menjadi catatan penting bagi BPBD Kota Padang dalam pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana tersebut.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor hambatan kebijakan mitigasi bencana gempa bumi di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat ialah dengan membangun hubungan baik untuk bekerjasama dengan lembaga terkait guna mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana dan meningkatkan kapasitas personil melalui berbagai bentuk pelatihan tanggap bencana.

Keterbatasan Penelitian : Penelitian ini mempunyai keterbatasan berupa waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilaksanakan dalam waktu yang singkat sehingga dalam pelaksanaan penelitian jadi tidak maksimal.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*) : peneliti menyadari masih perlu didalami dalam penelitian ini dengan begitu agar dapat dilanjutkan penelitian di lokasi yang sama berkaitan mitigasi bencana di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat khususnya Pemerintah Daerah Kota Padang, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kota Padang beserta jajaran dan anggotanya yang telah membantu Penulis dalam memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anderson. (1975). *Public Policy Making: Basic Concept in Political Sciences*. New York: Praeger University Series.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Awuni, M. A. (2019). Risk Assessment at the Design Phase of Construction Projects in Ghana. *Journal of Building Construction and Planning Research*, 7(2).
- Cresswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gulo, W. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Islamy, M. I. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lester, J. P., & Stewart, J. (2000). *Public Policy: An Evolutionary Approach* (2nd ed.). Australia: Wadsworth.
- MacRae, D., & Wilde, J. (1985). *Policy Analysis for Public Decisions*. Lanham: University Press of America.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, S. S., Haq, H. S., & Erwin, Y. (2020). *Hukum Mitigasi Bencana di Indonesia*. (M. Tohari, Ed.) (1st ed.). Klaten: Lakeisha.
- Pujianto, 2007. *Bahan Kuliah Perencanaan Struktur Tahan Gempa*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2015). *Evaluation, Theory, Models & Application*. Jossey-Bass.
- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (2007). *Evaluation Theory, Model, & Applications*. Jossey-Bass.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: alfabeta.
- Wirawan. (2012). *Evaluasi Teori, Model Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.

